

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Para pelajar yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA), adalah mereka yang berumur 17 s.d 21 tahun merupakan pemilih pemula yang baru akan pertama kali mengikuti Pemilu. Jumlah dari pemilih pemula ini sangat banyak sehingga partai-partai politik seringkali memburu pemilih pemula sebagai sasaran utama kampanye politik.

Berdasarkan proyeksi dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2009, jumlah penduduk muda (usia di bawah 40 tahun) sekitar 95,7 juta jiwa, jumlah tersebut setara dengan 61,5 % dari penduduk usia pemilih (www.bps.go.id). Sementara, berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum, jumlah pemilih pemula di Indonesia mencapai 30% dari 174 juta total pemilih Tahun 2009. (sumber : http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2009/04/090403_partai24.shtml).

Hasil penelitian Litbang Kompas menyebutkan bahwa antusiasme pemilih pemula, yaitu pemilih yang mengikuti Pemilu 2009 untuk pertama kalinya, terangkum dalam hasil jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas pada 25-27 November lalu. Dari sejumlah pemilih pemula yang diwawancarai melalui telepon, terungkap bahwa mayoritas (86,4 persen) menyatakan akan menggunakan hak suara mereka dalam pemilu. Tingkat antusiasme ini termasuk paling tinggi. Pada kelompok pemilih muda lainnya, yang sudah pernah menggunakan hak suaranya, seperti kelompok usia 22-29 tahun dan 30-40 tahun,

Ikman Nur Rahman, 2012
Pengaruh Pengembangan Kemelekwacanaan Warga kepada Negara dan Keterampilan Partisipasi dalam Pembelajaran Pendidikan Keawarganegaraan Terhadap Partipasi Politik Siswa

tingkat antusiasmenya lebih rendah sekitar 5 %. Pada kelompok usia yang lebih tua, yakni 41 tahun ke atas, antusiasme untuk mengikuti pemilu dalam bentuk memberikan suara lebih rendah lagi, yaitu 79,3 persen. (www.indonesiamemilih.com)

Besarnya potensi pemilih pemula ini haruslah mendapat perhatian khusus sehingga mereka tidak hanya dimanfaatkan oleh partai politik, salah satu pemanfaatan pemilih pemula adalah pada saat kampanye mereka kerap hanya dimobilisasi oleh parpol untuk mengikuti kampanye. Selain itu partai politik yang tujuannya hanya untuk menarik suara sebanyak-banyak seringkali lupa untuk memberikan pendidikan politik yang baik kepada pemilih pemula sehingga mereka sering melupakan untuk mengingatkan kepada pemilih pemula untuk benar-benar peduli dengan Pemilu. Selain rentan dimanfaatkan oleh partai politik, pemilih pemula juga rentan akan menjadi golput, karena kepedulian mereka terhadap Pemilu masih sangat kecil.

Pemahaman mengenai pemilihan umum sangat penting guna membentuk pemilih yang cerdas. Oleh karena itu baru-baru ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung sebagai penyelenggara pemilu bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan guru-guru Pendidikan Kewarganegaraan berusaha untuk melakukan sosialisasi pemilu kepada pemilih pemula di sekolah-sekolah agar siswa mengerti dan memahami hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam proses penyelenggaraan demokrasi, khususnya dalam pelaksanaan pemilu. Disamping itu, dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, para pemilih pemula tersebut diharapkan dapat memiliki *political awareness*, *political knowledge* dan

Ikman Nur Rahman, 2012

Pengaruh Pengembangan Kemelekwacanaan Warga kepada Negara dan Keterampilan Partisipasi dalam Pembelajaran Pendidikan Keawarganegaraan Terhadap Partipasi Politik Siswa

political will tentang pemilu/pemilukada sehingga dapat meningkatkan angka partisipasi pemilih Kota Bandung pada pemilu/pemilukada yang akan datang.

Kepekaan seseorang terhadap politik pun berkembang sejalan dengan berlansungnya proses sosialisasi dan kepekaan politik itu dapat dipelajari dan dibelajarkan. Sekolah sebagai saana sosialisasi politik merupakan tempat yang banyak memberikan pengaruh terhadap terbentuknya kepekaan politik anak. Semakin ekstensif pendidikan seseorang, semakin banyak dia menyadari pengaruh pemerintah, untuk mengikuti politik, untuk mendapatkan informasi politik, untuk memiliki cakrawala lebih lebar mengenai opini-opini dan masalah-masalah politik, terlibat dalam diskusi-diskusi politik dengan sekumpulan orang yang lebih banyak, merasa mempunyai kemampuan yang lebih besar untuk mempengaruhi permasalahan-permasalahan politik, untuk menjadi anggota suatu organisasi dan aktif dalam suatu organisasi secara sukarela, dan memperlihatkan/menaruh kepercayaan terhadap lingkungan sosialnya, dan memperlihatkan perasaan-perasaan kepercayaan dan pada akhirnya akan mendorong seseorang untuk berpartisipasi lebih aktif. (Mas'oeed dan MacAndrews dalam Sapriya & Winataputra : 2003, Almond dan Verba dalam Rush dan Althoff 2005 : 67-68)

Dalam pasal 3 Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), secara imperatif digariskan bahwa :

”Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa , berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab

Ikman Nur Rahman, 2012

Pengaruh Pengembangan Kemelekwacanaan Warga kepada Negara dan Keterampilan Partisipasi dalam Pembelajaran Pendidikan Keawarganegaraan Terhadap Partipasi Politik Siswa

Pendidikan Kewarganegaraan menjadi mata pelajaran yang penting dalam rangka memberikan wawasan politik bagi warga negara terutama yang masih duduk dalam persekolahan. Sehingga diharapkan generasi muda memiliki sikap partisipatoris terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Seperti disebutkan dalam Penjelasan Pasal 37 ayat (1) "Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air". Kemudian lebih lanjut oleh Quingley, (1991 : 3) dijelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dalam demokrasi adalah pendidikan dalam pemerintahan sendiri, dan pemerintahan sendiri diartikan sebagai partisipasi aktif dalam pengaturan sendiri, bukan penerimaan pasif dalam hubungannya dengan orang lain.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan itu sendiri adalah sebagai berikut :

1. Berfikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu-isu kewarganegaraan
2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta anti korupsi
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi

Ikman Nur Rahman, 2012

Pengaruh Pengembangan Kemelekwacanaan Warga kepada Negara dan Keterampilan Partisipasi dalam Pembelajaran Pendidikan Keawarganegaraan Terhadap Partipasi Politik Siswa

Sehingga tujuan akhir dari adanya Pendidikan Kewarganegaraan adalah partisipasi yang bermutu dan bertanggungjawab dalam kehidupan politik dan masyarakat baik di tingkat lokal maupun nasional. Partisipasi semacam itu memerlukan kompetensi kewarganegaraan sebagai berikut: (1) penguasaan terhadap pengetahuan dan pemahaman tertentu; (2) pengembangan kemampuan intelektual dan partisipatoris; (3) pengembangan karakter atau sikap mental tertentu; dan (4) komitmen yang benar terhadap nilai dan prinsip fundamental demokrasi konstitusional.

Winataputra (2001:317-318) mengatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dalam paradigma baru mengusung tujuan utama mengembangkan "*civic competences*" yakni *civic knowledge* (pengetahuan dan wawasan kewarganegaraan), *civic disposition* (nilai, komitmen, dan sikap kewarganegaraan), dan *civic skills* (perangkat kecakapan intelektual, sosial, dan personal kewarganegaraan) yang seyogyanya dikuasai oleh setiap individu warga negara. Tiga kompetensi di atas menjadi acuan yang harus dimiliki untuk mengembangkan sikap partisipatoris siswa sesuai dengan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di atas, karena itu dalam pembelajarannya di kelas adalah tugas guru menjadikan siswa menjadi kompeten dan partisipatori.

Dalam mewujudkan kompetensi tersebut, kemelekwacanaan warga negara (*civic literacy*) penting bagi peningkatan kualitas partisipasi politik karena keterlibatan rakyat dalam proses politik harus didasari pengetahuan yang memadai. Partisipasi warga negara yang dilandasi pengetahuan yang memadai diyakini akan menambah efikasinya. "The expression "*civic literacy*"

Ikman Nur Rahman, 2012

Pengaruh Pengembangan Kemelekwacanaan Warga kepada Negara dan Keterampilan Partisipasi dalam Pembelajaran Pendidikan Keawarganegaraan Terhadap Partipasi Politik Siswa

encapsulates the closely linked concepts of “civic engagement” (a key component of social capital for Putnam) and “literacy” or political knowledge. ... possible ways of enhancing civic literacy in Canada under three headings: education, media use and political institutions”. (Suryadi, 2009 : 207, Milner 2001 : 7-8).

Dari ungkapan di atas dapat diketahui bahwa *civic literacy* berhubungan dengan pengetahuan warga negara (*civic knowledge*). Kemelekwacanaan warga negara disini diartikan sebagai kapasitas pengetahuan dan kemampuan warga negara untuk memahami dunia politik mereka. Kemelekwacanaan warga negara juga merupakan ciri dari masyarakat madani dan keseluruhan indikator yang memungkinkan untuk membandingkan masyarakat sesuai dengan proporsi kewarganegaraannya masing-masing, yakni memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk pilihan politik yang efektif. Dimana pengetahuan politik tersebut bisa didapat dari dunia pendidikan, media baik elektronik maupun cetak dan institusi politik yang diantaranya adalah partai politik. Tiga poin penting ini yang berperan sangat penting memberikan pengaruh terhadap kualitas partisipasi politik siswa. Sehingga para pemilih diharapkan dapat lebih bijak untuk memilih (*civic virtue*) partai mana yang akan di pilihnya dalam Pemilu.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang paling menunjang untuk mendorong peningkatan *civic literacy* sebagaimana yang dijelaskan Milner (2001 : 22) bahwa “... *the most likely method of improving levels of civic literacy is civics education*” kemudian dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

Ikman Nur Rahman, 2012
Pengaruh Pengembangan Kemelekwacanaan Warga kepada Negara dan Keterampilan Partisipasi dalam Pembelajaran Pendidikan Keawarganegaraan Terhadap Partipasi Politik Siswa

“The challenge is to ensure that students are inculcated with literacy skills, and encouraged to develop what the IALS calls “habits of literacy”: reading newspapers and books, using libraries, making use of different sorts of maps, writing letters”

(Tantangannya adalah memastikan bahwa siswa ditanamkan keterampilan keaksaraan dan didorong untuk mengembangkan apa yang disebut IALS sebagai “kebiasaan melek wacana” : membaca koran dan buku, menggunakan perpustakaan, memanfaatkan berbagai jenis peta, menulis surat.

Pada kenyataannya literasi ini terus berkembang, kita tidak bisa lagi menyebut literasi hanya berkaitan dengan kemampuan menulis dan membaca saja. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi dengan adanya media elektronik audio visual dan internet proses pembelajaran ke arah penguatan kemelekwacanaan ini haruslah mengikuti perubahan tersebut. Metoda pembelajaran berbasis teknologi pun menjadi wajib untuk menunjang kemelekwacanaan warga negara.

Dalam KTT *21th Century Literacy Summit* (Iriantara, 2009 : 10) dirumuskan kompetensi yang harus dimiliki warga negara dalam perkembangan sosial, profesional dan teknologi untuk memperkaya pengetahuan dan keterampilan kritis manusia sebagai berikut :

1. Literasi teknologi : kemampuan untuk memanfaatkan media baru seperti internet untuk mengakses dan mengkomunikasikan informasi secara efektif.
2. Literasi Informasi : kemampuan untuk mengumpulkan, mengorganisasikan, menyaring dan mengevaluasi informasi dan untuk membentuk opini yang kokoh berdasarkan kemampuan tersebut.
3. Kreativitas media : kapasitas individu untuk berkembang di mana pun untuk membuat dan menyebarkan konten pada berbagai khalayak
4. Tanggungjawab dan kompetensi sosial : kompetensi untuk memperhitungkan akibat-akibat sosial dari publikasi *on-line* dan tanggung jawab terhadap anak-anak

Ikman Nur Rahman, 2012

Pengaruh Pengembangan Kemelekwacanaan Warga kepada Negara dan Keterampilan Partisipasi dalam Pembelajaran Pendidikan Keawarganegaraan Terhadap Partisipasi Politik Siswa

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Indikator dari kemelekwacanaan warga negara adalah meliputi pengetahuan faktual (*factual knowledge*) dan kecakapan kognitif (*cognitive proficiency*). Dengan mengkombinasikan batas perbedaan pengetahuan dari faktual dan dimensi kognitif dari pengetahuan politik, kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik.

Sedangkan keterampilan partisipatori (*participatory skill*) dalam *civic education* model "Foundation of Democracy" ini sangat peduli terhadap pengembangan keterampilan berfikir kritis dan reflektif, yang memang menjadi salah satu ciri dari tradisi "Reflektive Inquiry" dalam "social studies". Sementara itu keterampilan partisipatori juga dikembangkan dalam program "Foundation of Democracy" dengan rincian keterampilan partisipatoris sebagai berikut : (1) *Interacting*, (2) *Monitoring*, (3) *Influencing*. Dalam ketiga kategori "participatory skill" ini sangat potensial mendukung partisipasi siswa secara cerdas dan baik dalam kehidupan masyarakat.

Pendidikan kewarganegaraan memusatkan perhatian pada pembentukan kecerdasan *civic intelligence*, tanggung jawab *civic responsibility*, dan partisipasi warga negara sebagai landasan untuk mengembangkan nilai dan perilaku demokrasi. Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu proses pencerdasan, pendekatan mengajar yang selama ini seperti menuangkan air kedalam gelas *watering down* seharusnya diubah menjadi pendekatan yang lebih partisipatif dengan menekankan pada latihan penggunaan nalar dan logika. Sehingga pembelajaran PKN sekurang-kurangnya mengembangkan empat keterampilan yakni keterampilan dalam meneliti terutama melalui metode inkuiri, keterampilan

Ikman Nur Rahman, 2012

Pengaruh Pengembangan Kemelekwacanaan Warga kepada Negara dan Keterampilan Partisipasi dalam Pembelajaran Pendidikan Keawarganegaraan Terhadap Partipasi Politik Siswa

berfikir, keterampilan partisipasi sosial dan keterampilan berkomunikasi sosial. Dalam proses pendidikan politik di sekolah PKN mengajarkan siswa untuk memiliki kepekaan politik, hal ini berkaitan dengan kesadaran politik (*political awareness*), ialah kemampuan siswa menjadi paham (*informed about*) dan peka (*sensitive*) terhadap aspek-aspek politik, sosial, dan ekonomi di masyarakatnya. (Suryadi, 2000:24, Sapriya dan Winatapura, 2003 : 167)

Partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson dalam Damsar (2010 : 180) adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individu atau kolektif, terorganisasi atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.

Bentuk-bentuk partisipasi politik tersebut menurut Milbrath dan Goel (dalam Sastroadmodjo 1995 : 8) dibedakan sekurangnya dalam empat kategori:

1. Pertama apatis artinya orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.
2. Kedua spektator artinya orang yang setidak-tidaknya ikut memilih dalam pemilihan umum.
3. Ketiga gladiator artinya mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye dan aktivis masyarakat.
4. Keempat pengkritik artinya dalam bentuk partisipasi tak konvensional

Sedangkan Milbrath (Sastroadmodjo 1995 : 92-94) menyebutkan empat faktor utama yang mendorong orang berpartisipasi politik, antara lain :

- Sejauh mana orang menerima perangsang politik. Karena adanya perangsang, maka seseorang mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam hal ini minat untuk berpartisipasi dipengaruhi

misalnya oleh sering mengikuti diskusi-diskusi politik melalui mass media atau melalui diskusi formal.

- Faktor karakteristik pribadi seseorang.
Orang-orang yang berwatak sosial yang mempunyai kepedulian sosial yang besar terhadap masalah sosial, politik, ekonomi, sosial budaya hankamrata, biasanya mau terlibat dalam aktivitas politik.
- Karakteristik sosial seseorang.
Karakter sosial menyangkut status sosial ekonomi, kelompok ras, etnis dan agama seseorang. Bagaimanapun juga lingkungan sosial itu ikut mempengaruhi persepsi, sikap, perilaku seseorang dalam bidang politik. Orang yang berasal dari lingkungan sosial yang lebih rasional dan menghargai nilai-nilai seperti keterbukaan, kejujuran, keadilan dan lain-lain tentu akan mau juga memperjuangkan tegaknya nilai-nilai tersebut dalam bidang politik. Oleh sebab itulah, mereka mau berpartisipasi dalam bidang politik.
- Keadaan politik.
Lingkungan politik yang kondusif membuat orang dengan senang hati berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam lingkungan politik yang demokratis orang merasa lebih bebas dan nyaman untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas politik daripada dalam lingkungan politik yang totaliter. Lingkungan politik yang sering diisi dengan aktivitas-aktivitas brutal dan kekerasan dengan sendirinya menjauhkan masyarakat dari wilayah politik.

Partisipasi politik dalam Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu kemampuan yang diajarkan dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam rangka mencapai tujuannya yakni pemberdayaan segala potensi dan kemampuan siswa baik kemampuan, sikap maupun keterampilan serta berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, siswa sebagai bagian dari warga negara atau warga masyarakat yang hidup di tengah-tengah masyarakat akan banyak dihadapkan pada masalah-masalah politik. Untuk menghadapi masalah-masalah politik itu, siswa perlu memahami politik agar tumbuh kesadaran politik dan pada akhirnya akan berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pendidikan

Kewarganegaraan sebagai sebuah mata pelajaran diharapkan mampu memberikan
Ikman Nur Rahman, 2012
Pengaruh Pengembangan Kemelekwacanaan Warga kepada Negara dan Keterampilan Partisipasi dalam Pembelajaran Pendidikan Keawarganegaraan Terhadap Partipasi Politik Siswa

kontribusi terhadap kemelekwacanaan warga negara dan keterampilan partisipatori siswa sehingga siswa diharapkan menjadi warga negara yang partisipatif.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa kemelekwacanaan warga negara dan keterampilan partisipatori diharapkan dapat meningkatkan partisipasi politik dalam hal ini siswa Sekolah Menengah Atas. Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka secara umum yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh kemelekwacanaan warga negara dan keterampilan partisipatori dalam meningkatkan partisipasi politik siswa? Untuk lebih memfokuskan penelitian yang dilakukan, maka penulis merumuskan beberapa sub-permasalahan sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh kemelekwacanaan warga negara terhadap partisipasi politik siswa?
2. Seberapa besar pengaruh keterampilan partisipatori terhadap partisipasi politik siswa?
3. Seberapa besar pengaruh kemelekwacanaan warga negara terhadap keterampilan partisipatori siswa?
4. Seberapa besar pengaruh kemelekwacanaan warga negara dan keterampilan partisipatori secara bersama-sama terhadap partisipasi politik siswa?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam pengaruh pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan kemelekwacanaan warga negara dan keterampilan partisipatori untuk meningkatkan partisipasi politik siswa. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam seberapa besar pengaruh kemelekwacanaan warga negara terhadap partisipasi politik siswa
2. Mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam seberapa besar pengaruh keterampilan partisipatori terhadap partisipasi politik siswa
3. Mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam seberapa besar pengaruh kemelekwacanaan warga negara terhadap keterampilan partisipatori siswa
4. Mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam seberapa besar pengaruh kemelekwacanaan warga negara dan keterampilan partisipatori secara bersama-sama terhadap partisipasi politik siswa

D. Metode Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, yaitu penelitian yang datanya berupa angka-angka. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan teknik survey. Metode deskriptif-analitis dalam penelitian dioperasionalisasikan dengan menggunakan statistik

Ikman Nur Rahman, 2012

Pengaruh Pengembangan Kemelekwacanaan Warga kepada Negara dan Keterampilan Partisipasi dalam Pembelajaran Pendidikan Keawarganegaraan Terhadap Partipasi Politik Siswa

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

inferensial yaitu untuk menganalisis data sampel dan hasilnya digeneralisasikan (diinferensikan) untuk populasi dimana sampel diambil. (Sugiyono, 2001: 14).

Borg and Gall (1989) sebagaimana dikutip Sugiyono (2006: 7-8) menyatakan sebagai berikut:

Many labels have been used to distinguish between traditional research methods and these new methods: positivistic versus postpositivistic research; scientific versus artistic research; confirmatory versus discovery-oriented research; quantitative versus interpretive research; quantitative versus qualitative research. The quantitative-qualitative distinction seem most widely used. Both quantitative researchers and qualitative researcher go about inquiry in different ways. ”

Metode deskriptif analitis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik survey, karena mengambil sampel dari suatu populasi dengan menggunakan angket sebagai alat pengukur data pokok. Mc Millan & Schumacher (2001:304) menyatakan bahwa “dalam penelitian survey, peneliti menyeleksi suatu sampel dari responden dan menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan informasi terhadap variabel yang menjadi perhatian peneliti. Data yang dikumpulkan kemudian digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik dari populasi tertentu”. Kerlinger (2002: 267) juga menyatakan bahwa “para peneliti survey mengambil sampel dari banyak responden yang menjawab sejumlah pertanyaan. Mereka mengukur banyak variabel, mengetes banyak hipotesis, dan membuat kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan mengenai perilaku, pengalaman, atau karakteristik dari suatu fenomena”.

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data utama menggunakan teknik kuesioner dengan instrumen angket dan didukung dengan teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Variabel kemelekwacanaan warga negara (*civic literacy*) (X_1) bagian pengetahuan faktual (*factual knowledge*) diukur dengan menggunakan instrumen tes berbentuk pilihan ganda, dimana hanya ada satu jawaban benar. Jawaban benar diberik skor 1 dan yang salah 0.

Sedangkan variabel keterampilan partisipatori (X_2) dan variabel partisipasi politik siswa (Y) digunakan skala **SSHA** (*Survey of Study Habits and Attitudes*) dari Brown dan Holtzman. Pola skala SSHA Brown dan Holtzman ini dengan lima option, yaitu: (1) Selalu, (2) Sering, (3) Jarang; dan (4) Tidak Pernah. Jawaban yang tepat diberi bobot empat, dan yang tidak tepat sekali diberi bobot/skor 4,3,2,1. Keunggulan skala model ini tidak mengukur aspek kemampuan seseorang untuk menjawab, sebab yang dituntut dalam skala ini bukan bagaimana seharusnya ia menjawab soal ini dengan benar berdasarkan pengetahuannya, tetapi bagaimana kebiasaan mereka melakukan aktivitas sehari-hari.

Adapun teknik pengumpulan data pendukung yang digunakan adalah teknik observasi lapangan, dan studi dokumentasi sesuai kebutuhan. Dalam penelitian ini observasi dilakukan untuk mengetahui gambaran langsung tentang

proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Setelah data observasi diperoleh maka data tersebut dianalisis. Hadi (Sugiyono, 2009:145) mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

Teknik dokumentasi adalah pengumpulan data melalui hasil laporan tulisan yang resmi. Dokumen dapat berbentuk tulisan maupun gambar, peta maupun karya-karya monumental dari seseorang atau instansi tertentu. Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data-data dari pihak sekolah dan pengambilan gambar ketika proses pembelajaran.

Hasil ketiga teknik tersebut digunakan untuk memperdalam atau memperkuat data yang diperoleh melalui angket. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2009:142). Angket merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Dalam penelitian ini angket digunakan untuk menggali dan mengungkapkan hal-hal atau informasi sehingga terkumpul data yang lebih lengkap, akurat dan konsisten.

2. Populasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah SMA Negeri Kota Bandung. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMA kelas XI di Kota Bandung. Sampel penelitian siswa SMA kelas XI di 3 SMA yang berada di Kota Bandung yang ditentukan melalui *cluster sampling* dan *proportional random sampling*.

Tabel 1.1
Pembagian Cluster SMA Negeri di Kota Bandung

Cluster	Nama SMA
Cluster 1	SMAN 2, SMAN 3, SMAN 5, SMAN 8
Cluster 2	SMAN 1, SMAN 4, SMAN 11, SMAN 20, SMAN 22, SMAN 24
Cluster 3	SMAN 6, SMAN 7, SMAN 9, SMAN 10, SMAN 12, SMAN 14
Cluster 4	SMAN 13, SMAN 15, SMAN 19, SMAN 23, SMAN 25
Cluster 5	SMAN 16, SMAN 17, SMAN 18, SMAN 21, SMAN 26, SMAN 27

Sumber: <http://inggris.upi.edu/english/images/folderbaru/clustersmabdg.pdf>

Dari kelima cluster SMA Negeri di Bandung, maka dipilih tiga cluster yang mewakili SMA Negeri yang dikategorikan elite, sedang, dan rendah.

Sehingga diperoleh sampel :

SMA Negeri elite : SMA Negeri 2 Bandung

SMA Negeri Sedang : SMA Negeri 22 Bandung

Ikman Nur Rahman, 2012

Pengaruh Pengembangan Kemelekwacanaan Warga kepada Negara dan Keterampilan Partisipasi dalam Pembelajaran Pendidikan Keawarganegaraan Terhadap Partipasi Politik Siswa

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

SMA Negeri rendah : SMA Negeri 27 Bandung

3. Sampel Penelitian

Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Pemilihan sampel penelitian dilakukan melalui pengambilan sampel dengan dua cara. *Pertama*, pengambilan sampel SMA dilakukan dengan teknik *cluster* dan acak, yaitu secara *cluster* mengklasifikasikan seluruh SMA Negeri di Kota Bandung menjadi tiga kelompok sekolah dengan *cluster* atas, sedang dan menengah. Kemudian secara acak memilih sekolah yang dijadikan sampel penelitian.

Kedua, jumlah sampel yang diambil menggunakan rumus :

$$n = N / \{ 1 + N(e)^2 \}$$

Keterangan :

n = ukuran sampel

N = jumlah populasi, dalam hal ini 20038 orang

e = tingkat presisi (batas ketelitian) yang diinginkan, dalam hal ini 10%

Penentuan jumlah sampel dari masing-masing sekolah dilakukan secara proporsional, dan responden dari masing-masing sekolah dipilih secara acak (random). Dengan kata lain teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah proportional random sampling.

Ikman Nur Rahman, 2012

Pengaruh Pengembangan Kemelekwacanaan Warga kepada Negara dan Keterampilan Partisipasi dalam Pembelajaran Pendidikan Keawarganegaraan Terhadap Partipasi Politik Siswa

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Penelitian ini akan lebih bermakna apabila memberikan manfaat, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi masyarakat. Dalam segi keilmuan diharapkan penelitian ini nantinya akan dapat :

1. Memberikan gambaran mengenai pengaruh pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terhadap pengembangan kemelekwacanaan warga negara dan keterampilan partisipatori terhadap partisipasi politik siswa.
2. Menambah khasanah ilmu pendidikan khususnya dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan mengenai kontribusi Pendidikan Kewarganegaraan terhadap pengembangan kemelekwacanaan warga negara dan keterampilan partisipatori terhadap partisipasi politik siswa.
3. Menemukan konsep-konsep baru sebagai bahan masukan dalam pembuatan / perumusan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan yang lebih signifikan terhadap tujuan pendidikan nasional

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kepada :

1. Institusi Pemerintahan : Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk mempertegas bahwa pendidikan sebagai wahana mempertajam pengetahuan dan keterampilan warga negara berperan dalam menentukan partisipasi politik warga negara yang berkualitas.

Ikman Nur Rahman, 2012
Pengaruh Pengembangan Kemelekwacanaan Warga kepada Negara dan Keterampilan Partisipasi dalam Pembelajaran Pendidikan Keawarganegaraan Terhadap Partipasi Politik Siswa

2. Warga negara pada umumnya : Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk menambah wawasan keilmuan sekaligus sebagai stimulus untuk menggugah kesadaran kolektif pentingnya pendidikan dalam upaya mengembangkan warga negara yang partisipatoris
3. Institusi Pendidikan : Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pengkajian yang lebih komprehensif mengenai pentingnya pendidikan dalam upaya mengembangkan warga negara yang partisipatoris.

F. Struktur Organisasi Tesis

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Penelitian
- B. Identifikasi dan Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Metode Penelitian
- E. Manfaat/Signifikansi Penelitian
- F. Struktur Organisasi Tesis

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

PENELITIAN

BAB III METODE PENELITIAN

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Ikman Nur Rahman, 2012

Pengaruh Pengembangan Kemelekwacanaan Warga kepada Negara dan Keterampilan Partisipasi dalam Pembelajaran Pendidikan Keawarganegaraan Terhadap Partipasi Politik Siswa

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu